
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada BPKAD Pemerintah Kota Magelang (Tahun 2015-2018)

Sekar Ayu Widowati¹, Ari Nurul Fatimah²

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
e-mail: sekaaraw@gmail.com

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
e-mail: ari.nurul.fatihmah@untidar.ac.id

Abstract

The purpose of the analysis is to assess performance of BPKAD Magelang city, the period of 2015 – 2018. Secondary data is used in this study obtained from BPKAD Magelang city's Budget Relisation Report 2015 – 2018. The study is a descriptive study that uses effectiveness and efficiency analysis techniques to measure the performance of BPKAD Magelang City. Research shows that the effectiveness of budgeting over the 2015 – 2018 periode fluctuates from year, where in 2015 include in the criteria levels is less effective, in 2016 – 2018 include in the characteristic that are quite effective. In the run of the budget, BPKAD Magelang city has been processed efficiently that in 2015 and 2016 categorized as very efficient and 2017 – 2018 categorized efficient.

Keywords: Budget Marketing, Effectiveness, Efficiency

Abstrak

Tujuan penelitian ialah mengkaji kinerja dari BPKAD Kota Magelang tahun anggaran 2015 – 2018. Data dalam penelitian merupakan data sekunder yang didapatkan dari BPKAD Kota Magelang berupa Laporan Realisasi Anggaran periode 2015 – 2018. Penelitian ini ialah penelitian deskriptif yang menggunakan Teknik analisis efektivitas serta efisiensi untuk mengukur kinerja BPKAD Kota Magelang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran belanja selama periode 2015 – 2018 terjadi fluktuasi di setiap tahunnya, dimana tahun 2015 tergolong kedalam karakteristik kurang efektif, dan pada tahun 2016 – 2018 masuk karakteristik cukup efektif. Didalam pelaksanaannya, BPKAD Kota Magelang secara keseluruhan telah diolah secara efisien dimana pada tahun 2015 dan 2016 masuk karakteristik sangat efisien dan tahun 2017 – 2018 masuk karakteristik efisien.

Kata kunci : Anggaran Belanja, Efektifitas, Efisiensi

PENDAHULUAN

Pergantian susunan pemerintahan dari sistem lama dibutuhkan guna terwujudnya pemerintahan yang dapat dikatakan baik dimana pemerintah pusat yang kuat dalam memutuskan kebijakannya. Susunan baru ini membutuhkan sistem untuk mengurangi adanya ketergantungan antara pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan serta mampu mengatur daerah sehingga mereka mampu bersaing baik secara regional, nasional ataupun internasional. Hal ini bertujuan guna memungkinkan daerah mengurus serta mengendalikan urusan pemerintahannya sendiri supaya berguna serta sukses dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berfokus pada kepuasan terhadap masyarakat. Tuntutan lain timbul supaya organisasi pemerintahan mampu mencermati *value for money* yang menuntut pemerintahan harus bijak didalam pengadaan serta alokasi sumber daya, efisiensi didalam penggunaan sumber daya yang mana berarti pemakaian sebisa mungkin diminimalkan serta hasilnya dioptimalkan, dan efektif dalam arti agar dapat tercapai seluruh tujuan yang telah diharapkan (Yunina, 2019)

Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang biasa dikenal sebagai istilah otonomi daerah, kemudian selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lalu diperbaiki kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagai perimbangan keuangan diantara pemerintah pusat dan daerah, lalu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga dikeluarkan menyusul Undang-Undang sebelumnya. Kedua Undang-Undang ini berkaitan erat sebab dengan adanya pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah wajib disertai juga diserahkanya keuangan dimana dipercaya pemerintah pusat guna sebagai pengolah keuangan di tiap-tiap daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pada pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan melalui ketersediaan sumber pembiayaan yang didasarkan pada desentralisasi, dekonsentrasi, tugas administratif, serta instansi vertikal, butuh adanya pengaturan perimbangan keuangan diantara pemerintah pusat maupun

daerah berbentuk sistem keuangan dengan dasar dibaginya kewenangan, tugas serta tanggungjawab mutlak antara semua tingkat pemerintahan (Sari et al., 2018)

Anggaran ialah suatu susunan yang tertulis sehubungan dengan aktifitas sebuah organisasi, dimana secara kuantitatif dinyatakan sebagai periode tertentu, biasanya berbentuk satuan uang, namun bisa berupa satuan barang. Secara garis besar anggaran dapat diartikan sebagai perlengkapan manajemen untuk menggapai tujuan, sehingga diperlukan data serta informasi yang memiliki sifat terkendali maupun tidak yang digunakan sebagai bahan taksiran untuk keperluan penyusunan. Hal ini dikarenakan semua data beserta informasi yang berkaitan akan menjadi penentu keakuratan taksiran yang berkaitan dengan proses dari perencanaan anggaran (Han & Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, 2019).

Pada sebuah organisasi, anggaran berperan penting sebagai salah satu rencana keuangan yang diselenggarakan secara sistematis guna untuk mendukung tercapainya sasaran program kegiatan suatu organisasi. Tiap organisasi pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik supaya lebih berorientasi pada *Good Public* dan *Good Governance* dikarenakan adanya kewajiban dari masyarakat untuk dilakukannya transparansi serta akuntabilitas publik (Waney et al., 2018)

Standar Akuntansi Pemerintah mengatur seluruh proses penyajian laporan keuangan yang bertujuan sebagai bentuk peningkatan keterbandingan suatu laporan keuangan kepada anggaran tiap periode ataupun entitas. Laporan keuangan bertujuan secara luas guna berperan sebagai laporan keuangan guna nantinya digunakan sebagai pemenuh kebutuhan pengguna dari laporan. Dalam rangka pencapaian ini, selanjutnya ditetapkan semua pertimbangan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkaitan dengan penyajian dari laporan keuangan, persyaratan serta susunan laporan keuangan, juga isi dari laporan keuangan (Abarca, 2021).

Anggaran didefinisikan sebagai suatu rencana aktifitas yang mana diukur dengan satu kesatuan yang terdiri dari taksiran pengeluaran untuk suatu periode tertentu serta segala sumber yang digunakan untuk melakukan pembiayaan terkait

pengeluaran tersebut. (Roudlotul Jannah, 2013). Anggaran sektor pemerintah merupakan suatu rencana keuangan mengenai estimasi pengeluaran dan juga penerimaan yang ditargetkan di masa depan dapat terwujud dengan memeriksa data-data yang diperoleh sebelumnya sebagai pedoman penganggaran. Dalam organisasi sektor pemerintah, penganggaran ialah salah satu proses politik sebab di sektor pemerintah anggaran wajib memiliki sifat yang terbuka dan transparan agar dapat dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan oleh masyarakat. Proses dari penganggaran sektor pemerintah diawali saat rumusan strategi sudah dilakukan. Tahap penganggaran ini termasuk sangat bernilai dikarenakan anggaran yang tidak efisien serta tidak berorientasi pada kinerja bisa menjadi penyebab gagalnya perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Isi dari anggaran pemerintah mencakup rencana aktifitas yang disajikan dalam wujud rencana perolehan pendapatan serta pengeluaran dari unit mata uang (Pangkey & Pinatik, 2015)

Di dalam laporan realisasi anggaran ditemukan adanya data untuk menaksir sumber daya ekonomi dimana informasi ini digunakan sebagai keperluan dana untuk aktifitas pemerintahan pusat serta daerah dalam suatu periode dengan melakukan penyajian laporan secara komperatif. Laporan realisasi anggaran biasanya melakukan pengungkapan aktifitas keuangan pemerintahan berupa kedisiplinan terhadap APBD dengan melakukan penyajian ikhtisar sumber, alokasi, serta juga sumber daya ekonomi dimana dikoperasikan pemerintahan pusat maupun daerah pada periode tahun pelaporan tertentu. Laporan realisasi anggaran juga menunjukkan perbandingan target anggaran beserta dengan realisasinya pada suatu tahun anggaran (Andriani & Setyowati, 2016).

Belanja daerah ialah seluruh keluaran kas daerah maupun kewajiban yang dinyatakan berupa berkurangnya nilai kekayaan bersih pada periode anggaran tertentu yang mana didapatkan lagi pembayarannya oleh pemerintah. Berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja daerah diartikan sebagai keseluruhan keluaran rekening kas umum daerah yang dapat menyebabkan pengurangan saldo anggaran lebih pada suatu periode anggaran tertentu dimana

pembayarannya tidak didapatkan lagi oleh pemerintah. Belanja daerah mencakup seluruh keluaran rekening khas umum daerah yang menjadi penyebab kurangnya ekuitas dana lancar untuk kewajiban daerah pada periode anggaran tertentu dimana pembayarannya tidak dapat diterima kembali oleh daerah (Khotimah, 2017)

Efisiensi dan efektivitas dapat digunakan untuk mengamati bagaimana kondisi keuangan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, apakah telah dilaksanakan dengan ekonomis, menguntungkan, serta digunakan dengan sewajarnya dan memenuhi target dan hasil pencapaian tersebut memiliki kerasionalan terhadap sumber yang digunakan. Organisasi sektor publik dianggap baik apabila pihak yang terlibat bisa melaksanakan seluruh tugasnya yang juga berkaitan terhadap capaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan biaya relatif rendah. Kewajiban baru sebagai organisasi pemerintahan adalah selalu memperhatikan *value for money*, bersamaan dengan adanya tuntutan yang diterapkan masyarakat dimana harus selalu mengutamakan tanggung jawabnya terkait dilaksanakannya *value for money* yang terkait pengadaan serta alokasi sumber daya dengan artian penggunaannya dibuat seminimal mungkin namun dapat menciptakan hasil yang maksimal (Rosalina, 2012).

Berdasarkan uraian diatas peneliti bertujuan untuk analisis dan identifikasi efektivitas serta efisiensi anggaran belanja daerah dari BPKAD Kota Magelang. Kemudian penulis melakukan perhitungan dan analisis efektivitas dan efisiensi, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dari data yang sudah dianalisis sebelumnya.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan kategori penelitian yang digunakan. Data kuantitatif ialah data yang bisa dihitung dalam sebuah skala numerik maupun angka-angka. Data pada penelitian didapat melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada BPKAD Kota Magelang tahun anggaran 2015 – 2018.

Data sekunder digunakan dalam penelitian yang mana merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dipublikasikan kepada publik yang akan menggunakannya. Sumber data didapat melalui data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran periode 2015 – 2018 yang diambil melalui website dari BPKAD Kota Magelang.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang mana dilakukan dengan menghimpun data yang berkaitan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Magelang periode 2015-2018.

3. Perhitungan Efektivitas Anggaran Belanja

Realisasi anggaran belanja BPKAD ialah sebagai berikut :

Tabel 1. Efektifitas Anggaran Belanja

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran
2015	924.541.456.000	735.860.862.150
2016	1.017.467.369.000	871.859.130.603
2017	1.075.623.121.000	879.408.181.447
2018	1.065.723.224.000	936.685.044.170

Sumber : BPS Kota Magelang

Pengukuran tingkat efektivitas dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi anggaran belanja beserta seluruh target anggaran.

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja}{Target\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Karakteristik tingkat efektivitas berdasarkan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 (1996) ialah :

- Tingkat perbandingan melebihi 100%, anggaran belanja masuk kategori sangat efektif;
- Tingkat perbandingan 90% - 100%, anggaran belanja masuk kategori efektif;

- c. Tingkat perbandingan 80% - 90%, anggaran belanja masuk kategori cukup efektif;
- d. Tingkat perbandingan 60% - 80%, anggaran belanja masuk kategori kurang efektif; dan
- e. Tingkat perbandingan dibawah 60%, anggaran belanja masuk kategori tidak efektif.

4. Perhitungan Efisiensi Anggaran Belanja

Tabel 2. Eisiensi Anggaran Belanja

Tahun	Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Aggaran Belanja
2015	373.785.178.000	735.860.862.150
2016	454.035.623.000	871.859.130.603
2017	560.041.435.000	879.408.181.447
2018	657.171.555.875	936.685.044.170

Sumber : BPS Kota Magelang

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan jumlah keseluruhan realisasi anggaran belanja.

$$Efisiensi = \frac{Anggaran\ Belanja\ Langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Karakteristik tingkat efisiensi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 ialah :

- a. Tigkat perbandingan melebihi 100%, anggaran belanja masuk kategori tidak efisien,
- b. Tingkat perbandingan 90 - 100%, anggaran belanja masuk kategori kurang efisien,
- c. Tingkat perbandingan 80 - 90%, anggaran belanja masuk kategori cukup efisien,
- d. Tingkat perbandingan 60 - 80%, anggaran belanja masuk kategori efisien
- e. Tingkat perbandinga kurang dari 60%, anggaran belanja masuk kedalam kategori sangat efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja BPKAD Kota Magelang

Tabel 3. Tingkat Eektifitas Anggaran Belanja

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Efektivitas	Karakteristik
2015	924.541.456.000	735.860.862.150	79,59%	Kurang Efektif
2016	1.017.467.369.000	871.859.130.603	85,68%	Cukup Efektif
2017	1.075.623.121.000	879.408.181.447	81,76%	Cukup Efektif
2018	1.065.723.224.000	936.685.044.170	87,89%	Cukup Efektif

Sumber : Opendata Kota Magelang dan BPS Kota Magelang, data diolah

Efektivitas merupakan ketepatan penggunaan, hasil guna sebagai penunjang suatu tujuan. Efektivitas diartikan sebagai suatu unsur pokok dalam pencapaian tujuan serta target yang telah ditentukan oleh organisasi. Apabila tujuan dan sasaran telah tercapai maka dapat disebut sebagai efektif (Rosalina, 2012).

Rasio efektivitas dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data guna untuk melihat gambaran kemampuan daerah Kota Magelang dalam merealisasikan anggaran belanja. Berdasarkan penjabaran diatas selama periode anggaran 2015 – 2018 tingkat efektivitas dari BPKAD Kota Magelang mengalami fluktuasi di setiap tahun. Pada periode anggaran tahun 2015 BPKAD Kota Magelang masih terbilang kurang efektif karena tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 79,59% dengan target anggaran sebesar Rp. 925.541.456.000 dan terealisasi sebesar Rp. 735.860.862.150 dengan tingkat efektivitas berada di antara 60% - 80%, hal tersebut terjadi karena realisasi anggaran tahun 2015 belum bisa memenuhi target anggaran yang telah ditentukan. Selanjutnya pada periode anggaran 2016 tingkat efektivitas mengalami kenaikan yang cukup pesat yang dibuktikan dengan tingkat efektivitas lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 85,68% dan masuk kedalam kategori cukup efektif karena tingkat efektivitas berada

diantara 80% - 90%, dengan target anggaran sebesar Rp. 1.017.467.369.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 871.859.130.603. Hal tersebut berarti terdapat peningkatan dalam merealisasikan anggaran belanja dibanding tahun sebelumnya. Namun di tahun 2017 terjadi lagi penurunan tingkat efektivitas menjadi 81,76%. Meskipun mengalami penurunan tingkat efektivitas dibanding tahun anggaran sebelumnya, periode anggaran 2017 masih tetap masuk kedalam kategori cukup efektif karena tingkat efektivitas masih berada diantara 80% - 90%, dengan target anggaran sebesar Rp. 1.075.623.121.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 879.408.181.447. Kemudian pada periode anggaran tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 tingkat efektivitas kembali mengalami peningkatan yang dibuktikan dengan tingkat efektivitas sebesar 87,89% dan masih tetap masuk kedalam kategori cukup efektif, dengan target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.065.723.224.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 936.685.044.170.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tingkat efektivitas BPKAD Kota Magelang selama 4 tahun mulai dari tahun 2015 - 2018 belum ada yang masuk kategori efektif, meskipun sempat terjadi peningkatan yang cukup pesat, namun masih belum cukup untuk masuk kategori efektif karena realisasi anggaran belanja masih belum sesuai dengan target anggaran yang telah ditentukan yang disebabkan karena masih ada program kerja yang belum terlaksana.

2. Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja BPKAD Kota Magelang

Tabel 4. Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Tahun	Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Karakteristik
2015	373.785.178.000	735.860.862.150	50,79%	Sangat Efisien
2016	454.035.623.000	871.859.130.603	52,08%	Sangat Efisien
2017	560.041.435.000	879.408.181.447	63,68%	Efisien
2018	657.171.555.875	936.685.044.170	70,15%	Efisien

Sumber : Opendata Kota Magelang dan BPS Kota Magelang, data diolah

Kinerja dari efisiensi bisa diukur melalui perbandingan input yang dipakai dengan output yang akan dihasilkan. Pada kinerja operasional, umumnya output yang berkaitan dengan proses produksi akan diukur dalam satu unit produksi. Satuan ukuran akan berpegang terhadap aktifitas yang diukur. Ukuran aktifitas penerimaan bisa juga dihitung dengan seluruh jumlah penerimaan. Peningkatan produktifitas aktifitas penerimaan merupakan tujuan pengukurannya yang mana dapat dicapai dengan cara melakukan pengurangan jumlah penerimaan barang terhadap jumlah pembelian yang lebih banyak (Khotimah, 2017).

Rasio efisiensi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat besarnya selisih antara anggaran belanja daerah dengan realisasi belanja, yang mana selisih dari anggaran tersebut digunakan untuk mengukur efisiensi keuangan daerah Kota Magelang. Berdasarkan penjabaran diatas, sepanjang periode anggaran tahun 2015 -2016 tingkat efisiensi dari anggaran belanja pada BPKAD Kota Magelang mengalami fluktuasi di setiap tahunnya yang mana fluktuasi tersebut terjadi karena terdapat perbedaan pemangkasan anggaran yang dikeluarkan untuk setiap program yang dilaksanakan. Pada periode anggaran tahun 2015 dan 2016 tingkat efisiensinya sebesar 50,79% dan 52,08% dengan jumlah anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 373.785.178.000 dan Rp. 735.860.862.150 pada periode anggaran tahun 2015, dan Rp. 454.035.623.000 dan Rp. 871.859.130.603 pada periode anggaran tahun 2016, yang mana perubahan peningkatan tersebut dapat dikategorikan sangat efisien karena hasil pencapaian tingkat efisiensi berada dibawah 60%. Kemudian pada periode anggaran tahun 2017 tingkat efisiensi mengalami penurunan menjadi 63,68%, dengan anggaran belanja langsung Rp. 560.041.435.000 dan terealisasi sebesar Rp. 879.408.181.447. Kemudian penurunan tingkat efisiensi terjadi lagi pada periode anggaran tahun 2018 yang mana tingkat efisiensi menjadi 70,15% dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 657.171.555.875 dan realisasi anggaran belanja

sebesar Rp. 936.685.044.170. Ini berarti pada periode anggaran tahun 2017 hingga 2018 tingkat efisiensi BPKAD Kota Magelang berada pada kategori efisien karena tingkat efisiensi berada diantara 60% – 80%.

KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan analisis yang telah diselesaikan, maka kesimpulan penelitian ialah :

1. Pengelolaan anggaran belanja yang terdapat pada BPKAD Kota Magelang memiliki banyak karakteristik efektifitas mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Selanjutnya tahun 2015 tingkat efektivitas anggaran belanja pada BPKAD Kota Magelang mengalami penurunan sehingga masuk kedalam karakteristik kurang efektif. Sedangkan di tahun berikutnya yaitu tahun 2016, tingkat efektivitas mengalami kenaikan sehingga masuk kedalam kategori cukup efektif, dan begitu juga dengan tahun 2017 dan 2018. Namun demikian, sama seperti tahun sebelumnya, meskipun tingkat efektivitas sudah tergolong cukup efektif, anggaran yang digapai masih tergolong jauh beda dengan target anggaran yang telah ditentukan. Realisasi anggaran yang digapai belum sebanding dengan anggaran yang telah diatur sebelumnya dan menjadi salah satu alasan terjadinya fluktuasi tingkat efektivitas di setiap tahunnya. Hal itu dikarena masih terdapat program realisasi yang tidak sesuai dengan anggaran atau adanya program anggaran yang tidak atau belum terealisasi.
2. Tingkat efisiensi pada BPKAD Kota Magelang telah dikelola dengan baik dilihat dari hasil pencapaian tingkat efisiensi yang tidak melebihi 80%. Pada tahun 2015 dan 2016 tingkat efisiensi berhasil masuk kedalam golongan sangat efisien. Dan pada 2017 – 2018 tingkat efisiensi masuk kedalam golongan efisien. Sehingga dapat diartikan bahwa pengelolaan anggaran belanja pada BPKAD Kota Magelang telah berhasil dalam memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana ditekan menjadi seminimum mungkin dengan bertujuan untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, P. N., & Setyowati, E. (2016). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*.
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 2(1), 58–67.
- Han, E. S., & Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). Efektivitas.
Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Khotimah, A. K. (2017). ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014-2017 Ade. *Jurnal Akuntansi*, 1–8.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja.
Jurnal EMBA, 3(4), 33–43.
- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum
Universitas Surabaya*, 1, 0–216.
- Roudlotul Jannah. (2013). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kebumen.
Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan anggaran belanja. *Kinerja*, 15(1), 38.
<https://doi.org/10.29264/jkin.v15i1.4051>
- Waney, C. K., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Realisasi
Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di
Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern :
Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 334–341.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19527.2018>
- Yunina, F. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. *Jurnal
Akuntansi Muhammadiyah*, 9(1), 74–81.
<https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>